



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROMDHIATUN
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 858994

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.993.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 577 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1.827 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
4. Tanah Seluas 496 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1.123 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **181.000.000**

1. MOTOR, HONDA C86 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **41.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.697.459
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.232.697.459
III. HUTANG	Rp.	80.625.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.152.072.459

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.